

**ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENEN-
GAH (UMKM) MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM UNIT
PENGELOLA KEGIATAN (UPK) UNTUK MEMBANGUN EKONOMI
LOKAL**

(Studi Kasus Pada Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Alma Ata Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh:

YUSUP SUKMAN JAYADI

NIM: 132200049

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA**

2017

LEMBAR PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI
ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENEN-
GAH (UMKM) MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM UNIT
PENGELOLA KEGIATAN (UPK) UNTUK MEMBANGUN EKONOMI
LOKAL

(Studi Kasus Pada Kecamatan Pajangan)

Disusun oleh:

YUSUP SUKMAN JAYADI

NIM : 132200049

Telah diseminarkan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
pada tanggal 14 Juni 2017

Pembimbing,

Abdul Salam, S.H.I.,MA
Tanggal: 10 Juli 2017

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Alma Ata Yogyakarta

(Abdul Salam, S.H.I.,MA)

PERNYATAAN

Dengan ini kami selaku Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata Yogyakarta:

Nama : Yusup Sukman Jayadi

NIM : 132200049

Judul : “Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi Lokal”
(Studi Kasus Pada Kecamatan Pajangan)

Menyatakan setuju/tidak setuju naskah ringkasan yang disusun oleh mahasiswa yang bersangkutan dipublikasikan dengan/tanpa mencantumkan nama pembimbing sebagai *co-author*. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dijadikan koreksi bersama.

Yogyakarta, 10 Juli 2017
Pembimbing

(Abdul Salam, S.H.I.,MA)

ABSTRAK

Yusup Sukman Jayadi: Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi lokal.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan program PNPM-Mandiri (program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dipedesaan yang tertinggal. Untuk melaksanakan lokasi program kegiatan maka dibentuklah UPK (unit pengelola kegiatan) yang merupakan salah satu pelaku pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan. PNPM-Mandiri memiliki 2 program yaitu, program fisik dan non fisik yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi lokal. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peneliti kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Serta menggunakan teknik validitas data triangulasi yaitu menggunakan model reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat memberikan dampak kesejahteraan.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ilmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di Negara-negara terbelakang. Kendati studi perkembangan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi sejak kaum Markantalitis dan Adam Smith sampai Marx dan Keynes, namun mereka hanya tertarik pada masalah yang pada hakikatnya statis dan umumnya lebih dikaitkan dengan kerangka acuan lembaga budayada atau social budaya Eropa Barat.¹

Pembangunan adalah merupakan proses natural dalam mewujudkan cita-cita bernegaraya, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahteta secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran masyarakatnya ditandai dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat karna pendapatannya juga ikut meningkat. Pendapatan meningkat sebagai hasil produksi yang semakin meningkat pula. Proses natural diatas dapat terlaksana jika asumsi-asumsi jika

pembangunan yang ada, yaitu kesempatan kerja atau partipasi termanfaatkan secara penuh (*full employment*), setiap orang memiliki kemampuan yang sama (*equal productivity*), dan masing-masing pelaku bertindak rasional (*efficient*) dapat dipenuhi.²

Menurut Prof. Cairncross dengan tepat menyatakan: "pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah besar uang atau semata-mata fenomena ekonomi. Yang mencakup semua aspek perilaku Masyarakat, pene-gakan hukum dan ketertiban, kecermatan dalam hubungan bisnis, termasuk hubungan dengan instansi yang berkaitan dengan penerimaan Negara, hubungan antara keluarga, buta hurup, keakraban dengan peralatan mekanis dan sebagainya³

Syarat utama bagi pembangunan ekonomi adalah proses pertumbuhan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam Negeri. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material harus muncul dari warga Negara itu

¹ Jhingan, *ekonomi pembangunan dan perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 3

² *Ibid*, hlm. 4

³ Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 41

sendiri. Pembangunan harus diprakasai oleh Negara dan tak dapat dicengkokkan dari luar. Kekuatan luar setidaknya bisa merangsang dan membantu kekuatan Nasional. Ia hanya bersipat membantu, tidak mengganti. Bantuan luar Negeri hanya dapat mengawali atau merangsang pembangunan dan tidak untuk mempertahankannya. Semangat membangun harus datang dari dalam, tanpa itu prakarsa pembangunan akan terbuang percuma dan akan segera paham. Prof. Cairncross mengatakan dalam hal ini: "pembangunan tidak akan mungkin jika ia tidak terkena di hati Rakyat." Terlalu banyak bergantung pada bantuan Luar Negeri akan mematikan prakarsa pembangunan dan memberikan kebebasan kepada investor asing untuk mengurus sumber-sumber alam untuk kepentingan dan keuntungan mereka saja. Prof. Paul Baran berpendapat, bantuan seperti itu sama halnya dengan mengajak rakyat Negara terbelakang untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi mereka. Oleh karena itu agar proses pertumbuhan ekonomi dapat berumur panjang dan bersifat kumulatif maka tidak boleh bergantung dengan Negara lain supaya pembangun da-

lam Negeri yang harus ditingkatkan.⁴

Penduduk merupakan faktor produksi utama yang tersedia di negara-negara yang relatif terbelakang dan juga merupakan faktor yang berkelebihan. Karena itu mobilitas dari kekuatan-kekuatan penduduk ini untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan akan sangat baik dan dengan cara yang sesuai dengan masyarakat di situ akan menghasilkan suatu kemajuan yang sangat pesat.⁵

Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sumber ekonomi di Indonesia. Yang mana jumlahnya yang sangat signifikan dan menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyaknya. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan UMKM, dengan demikian dapat menunjang perekonomian suatu negara. Perkembangan UMKM menjadi faktor pendukung berbagai macam usaha baik usaha kategori mikro, kecil dan menengah,

⁴ *Ibid*, hlm. 43

⁵ M. suparmoko, *ekonomi pembangunan*, edisi 5, cetakan BPFE-Yogyakarta, hlm 222

khususnya di kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain dikenal dengan istilah kota Pelajar juga dikenal sebagai kota dengan sejuta wisata alamnya, yang sudah menarik masyarakat dunia baik itu domestik maupun internasional, kota dengan ciri khas makanannya (kuliner) dan juga kota kerajinan tangan batik tulis, batik kayu dll.

Membangun masyarakat Desa mempunyai peranan penting dalam membentuk kapital, yang merupakan gatra penting dipandang dari sudut pembangunan ekonomi. mobilitas tenaga-tenaga sukarela melalui program-program pembangunan masyarakat desa ini merupakan faktor penting, karena dapat membentuk dasar-dasar perekonomian dari fasilitas-fasilitas sosial seperti jalan-jalan, sekolah-sekolah dan sebagainya. Sudah tentu dengan jalan gotong royong dapat dihemat biaya pembangunannya.⁶

Agar menaikan tarif hidup suatu masyarakat serta untuk mengurangi kemiskinan dalam suatau negara diperlukan pembangunan disegala bidang, baik bidang sosial, pendidikan, hukum, bidang ekonomi

dan lainnya. Pembangunan disegala bidang itu sangatlah penting sebab tiap-tiap bidang adalah saling berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga apabila pemerintah mengabaikan tugas-tugas dilapangan lainnya diluar ekonomi maka hasil terakhirnya bukanlah pembangunan, melainkan mungkin sekali kekacauan dilapangan ekonomi⁷

Paradigma pembangunan Nasional saat ini sebagai kelanjutan paradigma sebelumnya adalah paradigma pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan perkotaan secara berkelanjutan, masyarakat perlu diperhatikan dan harus diberdayakan secara maksimal sehingga masyarakat bisa meningkatkan pendapatannyadan masyarakat juga harus ikut aktif dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengapresiasian dan pemeliharaan hasil pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola pembangunan

⁶*Ibid, hlm. 225*

⁷ DRS.H. Siagian, *pembangunan ekonomi dalm cita-cita dan realita*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 20.

melalui dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi, sampai dengan memanfaatkan (mengoprasikan) dan memelihara hasil pembangunan adalah sangat menentukan keberlanjutan proses pembangunan.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.⁸

Agar meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mulai tahun 2015. Melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dirumuskan kema-

li mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.⁹

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tahun 2015 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial

⁸ Fauzi Lendriyono, *beberapa pemikiran tentang pembangunan kesejahteraan sosial*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm 105

⁹ <http://www:pnpm mandiri pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri>, diakses pada tgl, 1 desember 2016, pukul 09:10 WIB.

Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen atau sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 2015 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. "Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2019. Pelaksanaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indo-

nesia mewujudkan pencapaian target-target tersebut.¹⁰

Kini pemerintah pusat menerbitkan program baru yang sasarannya bukan untuk masyarakat secara individu, tetapi membangun infrastruktur umum untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus memberdayakan semua masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga diharapkan dapat membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Program ini dikemas lewat Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK).¹¹

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan berbagai implementasi kebijakan Program pemerintah melalui Unit Pengelola Kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Pajangan.

1. Bagaimana strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat desa melalui

¹⁰<http://www.pnpm.mandiri.pedoman.umum.program.nasional.pemberdayaan.masyarakat.mandiri>, diakses pada tgl. 1 desember 2016, Pukul 09:12 WIB.

¹¹Darmawan Triwibowo, *mimpi Negara kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm 21

program unit pengelola kegiatan (UPK) ?

2. Bagaimana strategi Unit Pengelola Kegiatan dalam memberdayakan masyarakat ?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelaksanaan Program Unit pengelola Kegiatan (UPK) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dikelurahan Sendangsari

1. Mendiskripsikan tentang strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah masyarakat melalui program unit pengelola kegiatan (UPK).
2. Mendiskripsikan strategi unit pengelola kegiatan (UPK) dalam memberdayakan masyarakat.
3. Mendiskripsikan tentang dampak pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat terhadap kesejahteraan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi Islam, dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat Desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi lokal. Dapat menjadi referensi bagi peneliti yang mengkaji masalah-masalah penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah tentang bagaimana strategi dalam pemberdayaan masyarakat, keberhasilan program pemberdayaan ditandai dengan kesejahteraan masyarakat dan menjadi tolak ukur dalam pembangunan masyarakat yang berkualitas dimasa mendatang. sebagai bahan masukan bagi pemerintah, fasilitator (UPK) serta stakehold-

er yang terkait langsung maupun yang tidak langsung dalam pelaksanaan proyek Unit pengelola Kegiatan.

3. Bagi Instansi

Dapat menjadi masukan untuk unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan mengenai program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat dari segi strategi dan keberhasilannya terhadap kesejahteraan masyarakat binaan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Pengertian strategi

Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari kata *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang akan dituju. Jadi dalam garis besarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi adalah keputusan dalam penentuan misi, visi, tujuan, dan kebijakan dan cara untuk mencapai keunggulan dan menciptakan kondisi masa depan organ-

isasi.¹² Strategi adalah suatu proses sekaligus produk yang penting, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan agar tercapai tujuan.¹³

2. Pengertian pemberdayaan

Pengertian "daya" dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak.¹⁴ Istilah pemberdayaan atau *empowerment* secara leksikal, berarti penguatan. Secara teknis pemberdayaan disamakan dengan pengembangan.¹⁵ Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia agar mampu membela dirinya sendiri.¹⁶

Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun

¹² Nanang Fattah, *manajemen strategi berbasis nilai*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 29

¹³ Ibid, hlm 32

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1989), hlm. 188

¹⁵ Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2001), hlm. 41-42.

¹⁶ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 5.

berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya¹⁷

Imang Mansur Burhan dalam Nanih Machendrawaty mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.¹⁸ Menurut Mubyarto pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya atau kemampuan yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga merupakan upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri.¹⁹

Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses serangkaian kegiatan untuk

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun bersifat sosial, memiliki kepercayaan diri dan mempunyai mata pencaharian.²⁰ Aspek yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi mencakup lima tingkatan unsur yang saling terkait satu sama lain, yaitu peningkatan kesejahteraan, mengakses berbagai fasilitas yang tersedia, kesadaran, partisipasi dan kontrol.²¹

3. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam praktek pemberdayaan yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali pemberdayaan difokuskan pada bidang ekonomi untuk pengetasan kemiskinan (*poverty al-*

¹⁷<http://www.pnpmmandiri> pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, diakses pada tgl. 11 February 2017, pukul 09:00 wib

¹⁸Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat...*, hlm. 42.

¹⁹Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program...*, hlm. 37.

²⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 59-60.

²¹Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan...*, hlm. 4.

leviation) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*) oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan (*income generating*)²²

4. Strategi PemberdayaanUMKM

Ekonomi rakyat adalah ekonominya rakyat kecil yang merupakan ekonominya sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi rakyat berarti mengembangkan sistem ekonomi “dari rakyat”, “oleh rakyat”, dan “untuk rakyat”. Membangun ekonomi rakyat harus berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya.²³

Strategi pemberdayaan ekonomi menurut Mubyarto dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:²⁴

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberadaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan.
- b. Memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang nyata seperti menyediakan sarana dan prasarana fisik maupun sosial, pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, dalam rangka memperkuat potensi ekonomi dan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga memiliki arti melindungi rakyat, membela kepentingan masyarakat lemah, mencegah terjadinya persaingan

²² Totok Mardikanto dan Poebianto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*, (Bandung:Alfabeta, 2012), hlm. 133

²³ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*(Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 37.

²⁴ *Ibid*,

yang tidak seimbang dan juga praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang lemah.

Menurut Suharto pelaksanaan dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pemberdayaan yang disingkat 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.²⁵

5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan UMKM

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Schuler, Hashemi dan Riley yang dikutip oleh Edi Suharto mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan.²⁶ Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka dalam kemampuan ekonomi, kemampuan

mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis.

²⁷

- a. Kebebasan mobilitas, kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan individu untuk membeli barang-barang pokok kebutuhan sehari-hari (beras, minyak, bumbu), kebutuhan dirinya (sabun, sampo, peralatan makeup).
- c. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, televisi, radio, koran, majalah dan lain sebagainya.
- d. Terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga, misalnya keputusan merenovasi rumah, membeli kambing untuk ditenak. Membuat keputusan-keputusan sendiri maupun secara musyawarah dilakukan secara kebersamaan dan kesetaraan dalam keluarga.

²⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan....*, hlm. 67-68.

²⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 63.

²⁷Ibid, hlm. 64

- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, tidak adanya diskriminasi dalam keluarga yang menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran maupun kekerasan.
- f. Kesadaran hukum dan politik, keterlibatan individu dalam pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik. Misalnya mengetahui peran pemerintah desa atau kelurahan.
- g. Keterlibatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik, tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat.

Upaya pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktifitas rakyat. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam disekitar masyarakat dapat ditingkatkan produktifitasnya. Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan mereka.²⁸

6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Setiap Negara memiliki devinisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbeda-beda, jika ditinjau dari defenisinya UMKM di Eropa (*European commission*), usaha kecil yang didefinisikan sebagai usaha yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 50 orang dengan aset sebesar kurang sama dengan 10 juta euro dan omzet sebesar kurang sama dengan 10 juta euro. Usaha menengah didefinisikan sebagai usaha yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 250 orang dengan aset sebesar kurang sama dengan 50 juta euro dengan omzet sebesar kurang sama dengan 43 juta euro²⁹.

Negara Indonesia sendiri, mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tercantum pada undang-undang nomor 20 tahun 2008, Badan pusat statistik dan Depertemen Perindustrian dan

²⁸Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*(Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 37.

²⁹ Paramasari, *strategi dinas koperasi dan ukm kota surakarta dalam pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah*, (yogyakarta: bidang akademik universitas Muhamaddiyah Yogyakarta, 2009), hlm 8

Perdagangan. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro dengan aset maksimal 50 juta rupiah dan omzet maksimal 300 juta rupiah.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil ini memiliki aset lebih dari 50 juta rupiah dengan omzet lebih dari 300 juta sampai 2,5 milyar rupiah.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. Kriteria usaha menengah ini memiliki aset lebih dari 500 juta rupiah sampai 10 milyar rupiah dan omzet lebih dari 2,5 milyar sampai 50 milyar rupiah.

Menurut badan pusat statistik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan berdasarkan kuantitas tenaga kerja dan omzet, berdasarkan tenaga kerja yaitu usaha kecil, merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai 99 orang. sedangkan berdasarkan omzet, usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset tetap kurang dari 200 juta rupiah dan omzet pertahun kurang dari 1 milyar rupiah.³⁰

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Sebagaimana layaknya karya tulis, dalam penyusunan menggunakan beberapa metode un-

³⁰ www.hukumonline.com diakses pada tanggal 20/02/2017, pukul 10:00 WIB

tuk memudahkan dalam penyusunan skripsi. Dilihat dari segi bentuk data dalam penelitian ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.³¹ Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang datanya diambil dari lapangan, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.³²

Penelitian kualitatif biasanya digunakan pada penelitian dalam bidang sosial. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan latar dan individu tersebut secara utuh dan tidak mengisolasi individu ke dalam variabel, tetapi perlu

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.³³

B. Subyek dan Obyek Peneliti

1. Subyek Peneliti

Subyek penelitian adalah orang atau apa saja yang bisa menjadi sumber dalam memberikan informasi atau data penelitian. Suharsimi Arikunto membagi sumber penelitian dalam tiga katagori yaitu *person*, *place* dan *paper*.³⁴ Metode penentuan subyek ini bertujuan untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi subyek penelitian skripsi ini :

- a. Pihak UPK Pajangan Bantul, pimpinan UPK Pajangan Bapak Bpk. Muh. Mufassir, S.Ag, ketua program UPK Pajangan pemberdayaan UMKM.
- b. UMKM yang diberdayakan oleh UPK Pajangan di Kecamatan Pajangan Bantul.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu, Analisis Pemberdayaan Usaha

³¹ Jurnal ekonomi syariah indonesia, *analisis akad pembiayaan mudharabah dan implikasinya terhadap kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi syariah*, hlm. 63

³² Sugiono, *metode penelitian manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014) cetakan ke-3, hlm. 347

³³ Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian ekonomi teori dan aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 118.

³⁴ Jurnal ekonomi syariah indonesia, *analisis akad pembiayaan mudharabah dan implikasinya terhadap kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi syariah*, hlm. 65

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pajangan Untuk Membangun Ekonomi Lokal.

C. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit analisis yang karakteristiknya akan diduga, anggota unit populasi disebut disebut elemen populasi. Dalam hal yang sama pendapat lain, populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan menurut sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁵

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek atau subyek yang dipelajari, 23 UMKM atau usaha yang diberdayakan untuk pertumbuhan ekonomi lokal sebagai sampel, karna mengingat efesinsi waktu dan biaya, sebab UMKM tersebut berkedudukan di Kecamatan

Pajangan Bantul dengan kreteria UMKM yang sedang dibina atau diberdayakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pajangan Bantul.

Pemberdayaan UMKM meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek dan subyek itu. Dalam penelitian populasi yang ada menjadi UMKM yang diberdayakan oleh unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan sebanyak 260 anggotaUMKM yang diberdayakan. Suharsimi Arikunto yaitu:”Apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya lebih akurat penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subyek pada penelitian tersebut sebesar, dapat diambil 10-15% atau 20-25%atau bahkan lebih. Maka dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 26 orang UMKM($26 \times 100\% = 26/100 \times 10 = 26$).³⁶

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Unit pengelola Kegiatan (UPK) Pajangan Bantul, Jln, Kamijoro, Sendangsari, Pajangan Bantul, D.I. Yogyakarta. Kecamatan pajanga terdiri dari 3 kelurahan yaitu, kelurahan Triwidadi, kelurahan Guwosari, dan kelurahan

³⁵Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012) cetakan ke-21, hlm. 61.

³⁶Sugiono, *metode penelitian manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014) cetakan ke-3, hlm. 348

Sendangsari. Adapun dalam proses pemberdayaan Masyarakat maka peneliti mengambil penelitiannya di Kecamatan Pajangan Bantul, yang terdiri dari 55 Dusun, dari tiap Dusun tersebut menjadi Desa binaan UPK Pajangan dalam pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan ekonomi lokal. Adapun waktu penelitian dilaksanakan di bulan Maret 2017-Juni 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Untuk memperoleh data dalam penelitian digunakan prosedur, alat, serta kegiatan yang nyata. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik, observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁷

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan agar memperoleh data yang diharapkan, peneliti harus menggunakan metode yang relevan dengan metode yang dibutuhkan. Metode yang dimaksud untuk meninjau dan pengumpulan data yang berasal dari keterangan subyek, untuk

mendapatkan hasil dari beberapa subyek yang telah ditentukan sebelumnya, maka digunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.³⁸

Metode observasi adalah pengamatan, perhatian atau pengawasan, dalam metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek peneliti secara seksama cermat dan teliti dan sistematis. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen, dari peneliti pengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data ob-

³⁷Basrowi Suwandi, *memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 93.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) cetakan ke-14, hlm. 8.

servasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penelitian kedalam suatu skala bertingkat.³⁹

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴⁰

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku Manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Metode observasi adalah metode yang paling utama dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode observasi secara langsung di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pajangan dalam memberdayak UMKM untuk pertumbuhan lokal, mengamati dan mencatat secara sistimatis fenomena yang sedang diteliti.

2. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁴¹

Wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab dan suatu komunitas verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*). Wawancara metode ini memberikan kebebasan kepada peneliti untuk menemukan atau memperoleh informasi secara terbuka. Dalam wawancara ini peneliti perlu mendengarkan dan mencatat informasi yang didapatkan dari narasumber.

3. Dokumentasi

³⁹ Ibid, hlm 143

⁴⁰ Ibid , hlm 144

⁴¹Ibid, hlm. 137

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya, dalam menggunakan dokumentasi ini peneliti memegang ceklist untuk mencari variabel yang sudah ditentukan (Arikunto:2008)⁴²

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel. Dokumen disini meliputi materi (bahan) yang berupa video, film, memo, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah ilmiah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok dari hasil observasi dan wawancara mendalam.⁴³

F. Teknik Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintesis,

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dari catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁴

1. Reduksi Data

Reduksi data artinya proses pemilihan (eliminasi) pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasian, dari data kasar yang diperoleh dari lapangan. Dalam proses reduksi data ini peneliti melakukan ketika proses wawancara, peneliti melakukan data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan dan cerita apa yang sedang berkembang. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.⁴⁵

⁴² Ibid, hlm 67

⁴³ Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian ...*, hlm. 178.

⁴⁴ Basrowi Suwandi, *memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm. 193.

⁴⁵ Basrowi Suwandi, *memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm. 209

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penyajian data dapat mempermudah membaca dalam memahami dan dalam sebuah kejadian atau informasi yang diteliti. Segala aspek yang berhubungan dengan penelitian akan lebih mudah untuk disimpulkan.⁴⁶

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan angan-angan atau keinginan peneliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis.⁴⁷ Analisis SWOT diterapkan dengan menganalisis data memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya kedalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata dan menciptakan sebuah ancaman baru. Berikut penjelasan mengenai analisis SWOT, yaitu:⁴⁸

⁴⁶Ibid, hlm. 210

⁴⁷ Nanang Fatah, *manajemen strategik berbasis nilai* (Bandung: pt remaja posdaya, 2015), hlm. 78

⁴⁸Ibid, hlm. 80

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah unit pengelola kegiatan (UPK) pajangan

Pada tanggal 23 Mei 2006 diadakan rapat antara Mengko Kesra, Mengko Perekonomian, Menteri keuangan dan Kepala Bappenas beserta staf terkait memutuskan untuk melanjutkan program Pembangunan Kecamatan (PPK) dan program pengetahsan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang mendekati closing date dalam melakukan pendanaannya melalui pinjaman Bank Dunia, namun perlu diintegrasikan dalam suatu wadah Program Nasional dan akan di salurkan keseluruhan Desa dan kecamatan miskin. Program untuk membardayakan masyarakat miskin ini diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa ataupun perkotaan.⁴⁹

Unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara

partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan

- 1) UPK Pajangan adalah tercapainya Kesejahteraan Kemandirian Masyarakat Miskin Perdesaan

b. Misi unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan

- 1) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaannya.
- 2) Pelembagaan System Pembangunan Partisipatif.
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran Pemerintah local.
- 4) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas prasarana social dasar dan ekonomi Masyarakat.
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

⁴⁹ *Www. Kemendagri PNPM Mandiri, Rabo, 12 April 2017, pukul 14: 00 WIB.*

c. Tujuan unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan

Tujuan Umum

- 1) Tujuan umum PNPM Mandiri atau unit pengelola kegiatan perdesaan adalah meningkatkannya kesejahteraan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan ber-sinergi.

Tujuan Khusus

- 1) Meningkatnya partisipasi seluruh Masyarakat, khususnya masyarakat Miskin dan atau kelompok perempuan dan masyarakat adat dalam mengambil keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam local dan mempertimbangkan kelestariannya.
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pem-

angunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.

3. Legalitas dan Bentuk Organisasi

Pembentukan program unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan Dengan dasar hasil UDKP II ini Camat Pajangan membuat Surat Keputusan (SK) Camat Nomor : 414.2/271 B / VII/2001 tanggal 20 Oktober 2001, untuk Pembentukan dan Penetapan Kepengurusan Unit Pengelola Keuangan (UPK) saat itu UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Atas dasar Surat Keputusan Camat Pajangan itulah sebagai dasar terbentuknya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang sampai dengan saat ini kita sebut UPK PNPM Kecamatan Pajangan.

4. Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pajangan

Letak Geografis : Jln. Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul, D.I. Yogyakarta

Telp dan Sms Center : (0274)6461823 (08157902402)

Email @ :upk.[pajangan@gmail.com](mailto:upk.pajangan@gmail.com)

5. Prinsip Dasar

Prinsip dasar unit pengelola kegiatan (UPK) pajangan dalam operasinya mencakup dalam antara lain:

- a. Prinsip Moral : jujur, amanah, insani
- b. Prinsip Kelembagaan : Transparan, Dapat dipertanggung jawabkan, Profesional, Berdaya Guna, Pelayanan Prima, Berorientasi pada perbaikan mutu dan perbaikan terus menerus.
- c. Prinsip Pembangunan : inovatif, Kreatif, Preventif, berorientasi pada pembangunan ekonomi masyarakat
- d. Prinsip kebersamaan : Gotong Royong, Mengasihi, berorientasi untuk kepentingan bersama. Melihat kondisi dan keadaan Masyarakat pajangan saat ini berada di perbukitan dan dataran tinggi, hal ini tidak bisa lepas dari jenis mata pencaharian utama penduduk kecamatan pajangan adalah bekerja sebagai Petani, Buruh Tani, Buruh Harian. Untuk lebih detail, berikut tabel penduduk kecamatan Pajangan berdasarkan mata pencaharian.

Dari tabel diatas diketahui bahwa pekerjaan yang paling dominan adalah yang memiliki

keahlian khusus dan sebagai petani, sama halnya dengan penerima manfaat program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan matapencariannya sebagai petani, buruh harian, peternak hanya sebagai kerjaan tambahan saja.

A. Gambaran Umum Pemberdayaan UMKM

Daerah istimewa Yogyakarta adalah daerah dengan indeks kemiskinan yang sangat cukup tinggi, daerah istimewa Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten yaitu kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Gunung Kidul dan kota Madya Yogyakarta. Dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di kelurahan pajangan rata-rata masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, pertanian juga sebagai salah satu sentral utama Negara ini untuk mengujudkan kesetabilan pangan. Salah satu program pemerintah yang paling terkenal di masyarakat perdesaan adalah program PNPM Mandiri perdesaan yang mengacu pada pembangunan desa dan pemberdayaan kelompok serta simpan pinjam kelompok perempuan. Sedangkan unit pengelola

kegiatan (UPK) Pajangan adalah pengganti dari program PNPM Mandiri perdesaan pada asas dasarnya sama yaitu memberdayakan masyarakat.

Program PNPM Mandiri memiliki banyak program seperti pemberdayaan kota, pembangunan Desa, pembangunan di bidang Pariwisata. Program PNPM Mandiri 2 program yaitu program fisik dan program non fisik, adapun program fisik dari program PNPM Mandiri yaitu program pariwisata, program pembangunan Desa, program pembangunan kota adapun program non fisiknya adalah pemberian pinjaman berupa uang kepada Masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin.

Unit pengelola kegiatan sebagai salah satu program pemerintah yang menggantikan program PNPM Mandiri, seluruh aset yang dimiliki oleh PNPM Mandiri di kelola oleh unit pengelola kegiatan (UPK) adapun aset yang berupa fisik yang telah di jalan oleh PNPM Mandiri di serahkan kepada masyarakat atau desa untuk mengurus dan menjaga apa yang sudah ada, sedangkan aset yang berupa non fisik tersebut di kelola oleh Unit pengelola kegiatan (UPK) yang berupa uang.

Asset dari non fisik tersebut di gunakan untuk Unit pengelola kegiatan (UPK) untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin sehingga masyarakat yang kurang mampu tadi bisa meningkatkan taraf hidup dan taraf ekonomi supaya lebih baik lagi.

Menurut ibu wakijem unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan merupakan program pemerintah yang sangat bagus dan sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, setelah beliau ikut program unit pengelola kegiatan usaha warung makan yang di jalankan sekarang sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, baik dari segi pendapatan dan ekonominya.⁵⁰

B. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Program Pemberdayaan UMKM

Program pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan pajangan melalui program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pajangan pada prinsipnya program ini adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja untuk

⁵⁰ Wawancara dengan ibu Wakijem, pada tanggal 15 Mei 2017, pukul 02 :12 WIB

masyarakat miskin ataupun masyarakat yang kurang mampu di perdesaan yang ada di Kecamatan Pajangan. Dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat yang di berdayakan juga perlu peningkatan partisipasi dalam menjalankan program dari unit pengelola kegiatan (UPK) dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan yangt kurang mampu bisa terlaksana (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan). Ada 2 program pokok yang ada dalam unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan adalah sebagai berikut:

- a. Program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan)
- b. Pemberdayaan Masyarakat perempuan.

Sebanyak 23 kelompok SPP yang mengajukan proposal ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dinyatakan layak menerima pinjaman berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) perguliran SPP kecamatan Pajangan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Maret 2017 di pendopo kecamatan Pajangan.

C. Kegiatan simpan pinjam untuk kaum perempuan SPP

Kegiatan simpan pinjam untuk permualan kelompok perempuan (SPP) merupakan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertrujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha sekala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong penguangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Tujuan khusus

- a). Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan usaha.
- b). Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
- c). Mendorong penguatan lembaga simpan pinjam oleh perempuan

Program pengelola kegiatan (UPK) pajangan adalah salah satu dari program pemerintah yang memiliki tujuan dan fungsi yaitu bagaimana bisa memberdayakan masyarakat

yang kurang mampu dan masyarakat yang kreatif tapi masyarakat itu tidak memiliki modal sehingga UPK akan mensuport dalam usahanya berupa pemberiann modal kepada masyarakat ataupun kelompok yang ingin meningkat perekonomian atau yang ingin memajuakn usahanya, dalam pemberian modal ini diperlukan beberapa syarat anantara laian:

- (1). Kelompok perempuan.
- (2). Kelompok perempuan sudah ada di masyarakat.
- (3). Anggota minimal 5 orang dalam kelompok.
- (4). Berdomisili dan ber KTP Pajangan.
- (5). Kelompok atau anggota yang mempunyai usaha.
- (6). Menyerahkan foto copy KTP, KK, Buku nikah.
- (7). Kelompok yang baru mengajukan pinjaman di bolehkan meminjam minimal Rp 500.000,- (per anggota)

minimal dalam pengajuan modal setiap kelompok harus mmiliki anggota minimal 5 orang atau anggota dan uang yang dipin-

jam pada saat awal adalah Rp.5000.00,- dan dalam pengembalian persentasenya ataupun dalam istilah islam adalah bagi hasil disepakati pada saat kita melakukan pengajuan pembiayaan.

pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah para responden menilai bahwa program dari unit pengelola kegiatan (UPK) sudah sangat bagus dan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan Pajangan melalui program unit pengelola kegiatan dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi lokal, pada prinsipnya program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan mendapatkan kesempatan kerja yang sama, dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan pajangan di perlukan kemandirian serta partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan

adapun program yang ada di unit pengelola kegiatan (UPK) pajangan.

Unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan juga memberikan penghargaan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengorganisasikan kelompoknya, Kebahagiaan terpancar dari wajah pengurus kelompok SPP Dahlia Butuh Kidul, Triwidadi ketika mendengar pengumuman hasil penilaian SPP AWARDS 2016 di pendopo kecamatan Pajangan pada hari Kamis (29/12), karena kembali meraih nilai tertinggi dalam evaluasi dan penilaian kelompok (SPP AWARDS). Ini merupakan tahun kedua kelompok SPP ini berhasil menyabet gelar juara SPP AWARDS setelah pada tahun 2015 lalu juga berhasil meraih juara. Sementara untuk juara 2 di raih oleh kelompok Teratai Kadireso, juara 3 kelompok Panjangsari Panjangan, harapan 1 kelompok Mediasari Karangber dan harapan 2 kelompok KWT I Mangir Kidul. Untuk kelompok Mediasari dan KWT I, ini merupakan kali pertama bisa masuk lima besar SPP AWARDS setelah dua tahun sebelumnya hanya masuk nominasi 15 besar.

Program simpan pinjam perempuan (SPP) yang ditawarkan oleh unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan adalah pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis kearifan local, melihat kondisi dan lingkungan masyarakat kecamatan pajangan sangatlah mendukung untuk dibina serta diberdayakan. Program unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan hanya memberdayakan kaum perempuan saja, karna kaum perempuan dinilai sebelah mata sehingga simpan pinjam perempuan ini muncul untuk mengatasi masalah yang sering terjadi di rumah tangga terutama masalah keuangan, kaum perempuan disini tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja akan tetapi kaum perempuan disini dilatih menjadi perempuan yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan perempuan yang memiliki pengasilan.

Adanya kerja sama lintas pelaku (multistakeholders) fasilitator, pendamping lapangan dari program pemberdayaan harus rutin mendampingi masyarakat yang diberdayakan dan memastikan tahap-tahap dari program pemberdayaan itu sudah berjalan optimal atau tidak, baik pemerintah, swasta,

duni usaha, dan yang lain yang bisa memperkuat akses perkembangan dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti, faktor pendukung kemajuan dari suatu program pemberdayaan diatas adalah program yang berdasarkan kearifan lokal. Melihat rata-rata usaha yang dijalankan di kecamatan Pajangan antara lain, usaha Emping belinjau, usaha Gula jawa, usaha telur asin, usaha kacang kulit, usaha pengrajin batik kayu, usaha warung makan soto dan masih banyak lainnya, Itu semua menonjolkan kearifan ekonomi lokal. Melihat lingkungan kecamatan pajangan yang memiliki potensi baik dari segi sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Sehingga dapat bersinergi dengan program yang dijalankan oleh unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan. Namun selama program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

(UMKM) yang menjadi pengambat adalah dari segi marketnya masyarakat susah untuk memasarkan hasil usahanya kejangkauan yang lebih luas lagi dan kendala selanjutnya yaitu kurangnya sarana transportasi serta jalan yang rusak sehingga sulitnya untuk memasarkan produk yang ada.

Strategi diatas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT agar tepat dalam mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi lokal, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh. Mufassir selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan dapat diketahui faktor internal (kekuatan dan kelemahan) pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berikut table analisis SWOT berdasarkan strategi diatas

Tabel 4.8 Matriks SWOT Serta Strategi Pengembangannya

Faktor-faktor Strategi Internal	<i>Strength</i> (kekuatan)	<i>Weakness</i> (kelemahan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Program berdasarkan Kearifan lokal • Kemudahan untuk memulai usaha dengan modal yang tidak terbatas (tidak ada batasan minimal) • Jenis produk yang sangat beragam • UMKM tidak terpengaruh oleh fluktuasi mata uang asing karena masih menggunakan bahan baku dalam negeri • Kemudahan bahan baku yang mudah didapatkan • Harga yang relatif terjangkau oleh semua kalangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya komitmen, kemampuan, dan kualitas pembinaan • Kualitas produk yang kurang kompetitif • Rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti kurangnya pemahaman pemasaran, pengetahuan akuntansi, rendahnya produktifitas sehingga daya saing rendah • Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi (seperti internet), sehingga jangkauan pemasaran terbatas dan efisiensi usaha rendah • Jaringan untuk

<p>Faktor-Faktor Strategi Eksternal</p>		<p>memasarkan produk yang minim</p>
<p><i>Opportunity</i> (peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semakin pesatnya kerjasama ekonomi antara negara, terutama dalam konteks ASEAN • Potensi pasar dalam negeri yang terus berkembang, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk • Meningkatnya kesadaran, komitmen dan keberpihakan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan arti pentingnya UMKM dalam perekonomian 	<p><i>Strategi SO</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan dan mengembangkan UMKM menjadi wadah usaha yang unggul dan menciptakan pangsa pasar yang luas • Menciptakan usaha baru dalam pemberdayaan UMKM menjadi wadah pelatihan akademisi usaha lainnya. • Mendorong terbentuknya suatu usaha yang berbasis kearifan lokal untuk menghindari kesulitan mencari bahan baku. • Menciptakan kondisi yang mendukung untuk menarik investor dari luar daerah. • Melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan UMKM secara terpadu. 	<p><i>Strategi WO</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran dan fungsi koperasi sebagai instansi teknis pemerintah daerah bidang dalam pengembangan UMKM dan didukung dengan kebijakan yang berpihak kepada pengusaha kecil. • Mendorong dan memberikan perlindungan kepada pengusaha UMKM. Memperbaiki sarana dan prasarana, tetap adanya pembimbingan dan pelatihan sampai Pengusaha yang handal.

<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya SDM angkatan kerja dalam jumlah besar yang masih terdayagunakan secara produktif • Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat menunjang dinamisi kegiatan bisnis dan juga menjunjung kemampuan akses pasar secara cepat. 		
<p><i>Threat</i> (ancaman)</p> <p>a. Persaingan UMKM yang semakin ketat dengan banyaknya muncul inovasi baru yang didukung</p> <p>b. Rendahnya kepercayaan konsumen terhadap pelaku</p>	<p><i>Strategi ST</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas produk UMKM serta berinovasi • Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama • Peningkatan aksesibilitas terhadap pasar dan mengembangkan UMKM • Meningkatkan 	<p><i>Strategi WT</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan formal/non formal dalam peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM • Implementasi teknologi dalam meningkatkan kualitas produk.

<p>UMKM akibat kurangnya komitmen akan penegakan etika bisnis</p> <p>c. Kelemahan pengaturan dan penegakan hukum semakin terdesaknya UMKM oleh usaha besar yang secara agresif memasuki wilayah usaha yang sepantasnya diperuntukan UMKM</p> <p>d. Masih rendahnya komitmen mutu pelaku UMKM menyebabkan rendahnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas</p>	<p>manajemen sistem pemberdayaan UMKM mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan UMKM serta mengembangkan pola investasi dan permodalan. 	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Jadi strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan sesuai

dengan apa yang dikatakan oleh Mubyarto dalam strategi pemberdayaan masyarakat. Teori yang dikatakan oleh Mubyarto juga memiliki kesamaan dengan teori yang dikatakan oleh Suharto bahwa pelaksanaan dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pemberdayaan yang disingkat 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.⁵¹ dalam hal ini strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan sesuai dengan teori Mubyarto dan Suharto yang berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat.

D. Dampak Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi Lokal.

Adapun dampak yang diberikan oleh UPK terhadap pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat bisa meningkatkan daya ekonomi dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa men-

urangi pengangguran yang ada .hal yang paling terpenting dalam sistem pemberdayaan masyarakat desa melalui program usah mikro kecil dan menengah adalah bagaiman masyarakat itu sendiri bisa memberdayakan dirinya sendiri tanpa ketergantungan sama orang laian. Dilihat dalam segi sosial apabila tarah hidup masyarakat meningkat maka kesenjangan sisoal tidak begituh bertimpang tindih terlalu jauh di bandingan dengan kedaaan sosial pada zaman dulu.

Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh sesuatu (baik positif maupun negatif). Dampak itu sendiri juga bisa berarti, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya 'sesuatu'.⁵² Berbicara mengenai dampak, tidak dapat lepas dari dampak yang sifatnya primer dan dampak yang sifatnya sekunder. Dampak yang sifatnya primer yaitu perubahan lingkungan yang disebabkan secara langsung oleh suatu kegiatan. Sedangkan dampak yang sifatnya sekunder yaitu perubahan lingkungan secara tidak

⁵¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan...*, hlm. 67-68.

⁵²Departemen pendidikan dan kebudayaan, *dampak pembangunan ekonomi (pasar) terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat* (Yogyakarta: Depdikbud, 1995), hlm. 87.

langsung dari suatu kegiatan, artinya perubahan yang terjadi sebagai kelanjutan dari dampak yang sifatnya primer.⁵³

Mengenai dampak primer maupun sekunder akan terjadi dampak yang sifatnya positif dan negatif. Dampak yang sifatnya positif adalah perubahan lingkungan yang menimbulkan keuntungan. Sedangkan dampak negatif merupakan perubahan lingkungan yang menimbulkan kerugian.⁵⁴

Program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan kesejahteraan dengan pemberdayaan yang secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan menguntungkan masyarakat yang ada di kecamatan pajangan. Memberikan dampak yang sangat positif dilihat dari keuntungannya yang sudah didapati saat ini, yaitu meningkatnya pendapatan usaha yang sedang dijalankan saat ini. Dengan keuntungan yang diperoleh tersebut masyarakat merasa nyaman dan aman mempunyai usaha pribadi berarti dia telah mempunyai tabungan berjangka panjang serta bersifat produktif, dari

hasil keuntungan yang diperoleh sebagian hasilnya disisihkan untuk membayar angsuran kepada unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan angsuran pinjaman tersebut disetorkan kepada ketua kelompok masing-masing kemudian ketua kelompok menyetorkan besar pinjaman kepada unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sanijah sebagai berikut:

*“program unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan dari pemerintah sangatlah membantu masyarakat yang kurang mampu, setelah saya melakukan pembiayaan di UPK Pajangan usaha yang saya jalankan saat ini semakin tumbuh dan berkembang sehingga saya merasa aman dan nyaman melakukan pembiayaan di UPK Pajangan karna di sana tidak ada potongan administrasi”.*⁵⁵

Dampak yang dirasakan oleh ibu Sumarti beliau adalah guru pensiunan di TK Mangir Kidul, ibu Sumarti ikut pengajuan di PNPM Mandiri sejak program itu disahkan oleh pemerintah dan sampai saat ini

⁵³*Ibid,*

⁵⁴*Ibid,*

⁵⁵Sanijah, penerima manfaat pembiayaan atau pemberdayaan, wawancara tanggal 15 April 2017 pukul 10:15 WIB.

beliau juga melakukan pengajuan di unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan ibu Sumarti salah satu anggota yang melakukan pinjaman pang besear sekitar Rp. 15.000.000.- uang yang dipinjam di Unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan digunakan untuk membantu para tetangganya yang sangat membutuhkan bantuan berupa uang dan beliau juga memodali para tetangganya untuk membuat usaha adapun usaha yang dijalankan oleh para tetangganya berupa usaha emping belinjau, usaha Gula jawa, usaha Telor asin dari hasil usaha para tetangganya tersebut ibu Sumarti membantu untuk memasarkan hasil produk tetangganya ke pasar-pasar. Begitu juga dengan ibu Sutiyah, ibu Suryanti, ibu Mukidah, ibu Trisuratmi dan ibu Ngatinah mereka semua merasa senang dan bersyukur karna pemerintah masih peduli terhadap Masyarakat yang kurang mampu, walaupun program dari unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan hanya memberikan pinjaman berupa modal uang akan tetapi pinjaman tersebut sangatlah membantu dan

mereka juga bisa menyetekolahkan anak-anak mereka.⁵⁶

Berbeda dengan Ibu Miyem, mengatakan:

“program dari unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhannya sehari-hari karna Ibu Miyem melakukan pinjam di UPK sebesar Rp. 500.000.-beliau termasuk anggota dengan pinjaman paling sedikit, beliau takut meminjam terlalu banyak takutnya tidak bisa melunasi biayar angsuran”⁵⁷

Program dari unit pengelola Kegiatan (UPK) Pajangan sangatlah membantu Masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa pinjaman modal untuk membuka usaha baru ataupun untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, menurut Ibu Hartini, Ibu Sumami, Ibu Wajim, Ibu Partini dan Ibu Siti Duriah adalah salah satu pengusah dari warung makan yang merasakan terbantu sangat dari program UPK Pajangan usaha yang dijalankan saat ini mengalami

⁵⁶Sumarti, penerima manfaat pembiayaan atau pemberdayaan oleh UPK, wawancara tanggal 20April 2017 pukul 10:15 WIB.

⁵⁷Miyem, penerima manfaat pembiayaan atau pemberdayaan oleh UPK, wawancara tanggal 21April 2017 pukul 11:15 WIB.

kemajuan serta usaha yang dijalankan sekarang sudah bisa membuka lapangan kerja buat orang lain yang membutuhkan pekerjaan dan dari hasil usaha yang dijalankan tersebut bisa merenovasi tempat usahanya semakin bagus lagi.⁵⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Masyarakat Desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi local, dilakukan melalui beberapa cara ataupun beberapa proses diantaranya.
2. Penguatan modal yang diberikan oleh unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pemberian

modal pinjaman semua anggota dari kelompok pada saat pencairan dananya semua anggota dikumpulkan di tempat ketuanya, dan pemberian pinjaman modal langsung diberikan langsung ke anggotanya masing-masing. Dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah pemberian pinjaman modal usaha diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

3. Dampak pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Masyarakat desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi local, dapat memberikan manfaat ataupun dampak yang sangat positif, dilihat dari kemajuan serta kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah melakukan pinjaman ke unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan. Dengan keuntungan tersebut masyarakat merasa aman dan nyaman karena mereka mempunyai usaha yang dijalankan sendiri berarti masyarakat mempunyai tabungan jangka panjang dan bersifat produktif, karena dari usaha tersebut yang dijalankan saat ini bisa membantu masyarakat yang

⁵⁸Partini, penerima manfaat pembiayaan atau pemberdayaan oleh UPK, wawancara tanggal 2 April 2017 pukul 11:15 WIB.

mebutuhkan bantuan. Dari usaha yang dijalankan bisa berkembang dan maju dapat membantu masyarakat atau pemerintah untuk menurangi kemiskinan yang ada. Dampak pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga bisa menjaga ketahanan dan keberlangsungan hidup masyarakat banyak mendapatkan pekerjaan dan kejayaan hidup, program dari unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan bisa membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan kemelaratan serta bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan mampu untuk membeli bahan komoditas bahan pokok.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan dan memberikan saran-saran untuk meningkatkan kemajuan dari program unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

1. Bagi UPK Pajangan

- a. Sesuai dengan visi unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan adalah tercapainya Kesejahteraan Kemandirian Masyarakat Miskin Perdesaan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh UPK Pajangan harus ditingkatkan lagi dari segi pelayanan serta pihak UPK Pajangan juga harus sering memberikan motivasi terhadap kelompok atau anggota yang diberdayakan, dari segi programnya UPK Pajangan harus ditambah lagi supaya masyarakat dapat mengakses pelayanan program yang baru sehingga bisa menambah pengalaman atau wawasan masyarakat.
- b. Dalam pemberian modal pinjaman seharusnya dari UPK Pajangan harus lebih teliti dan lebih ketat lagi dalam memberikan pinjaman supaya program dari UPK Pajangan tidak mengalami salah sasaran.
- c. Pihak UPK Pajangan juga diharapkan bisa memberikan trobosan ataupun bisa bekerja sama dengan instansi lain supaya mempermudah masyarakat dalam pelayanannya.

2. Bagi peneliti berikutnya Pembahasan mengenai pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih jauh dari kesempurnaan, peneliti mengharapkan dari kekurangan-kekurangan dari peneliti ini dapat dijadikan kajian untuk peneliti selanjutnya, serta dapat melengkapi semua kekurangan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dimana identifikasi masalah akan selalu ada dan berbeda-beda, serta strategi yang dijalankan juga dalam memberdayakan juga bermacam-macam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)
- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)
- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan...*,

Badan kependudukan jogjaprovo dan statistic periode 6 2016. Kamis 13 April 2017, pukul 13:33 WIB.

Jhingan, *ekonomi pembangunan dan perancangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007)

Basrowi Suwandi, *memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Dapertemen pendidikan dan kebudayaan, *dampak pembangunan ekonomi (pasar) terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat* (yogyakarta: Depdikbud, 1995)

Darmawan Triwibowo, *mimpi Negara kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006)

Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian ...*,

DRS.H. Siagian, *pembangunan ekonomi dalm cita-cita dan realita*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1989

Edi Suharto, *kebijakan social sebagai kebijakan public dan peren pembangunan kesejahteraan social pekerjaan so-*

- cial dalam mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare) di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan....*,
- Fauzi Lendriyono, *beberapa pemikiran tentang pembangunan kesejahteraan social*, (Malang: UMM Press, 2007),
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997),
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997)
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program....*,
- Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian ekonomi teori dan aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001)
- Nanang Fatah, *manajemen strategik berbasis nilai* (Bandung: pt remaja posdaya, 2015)
- Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2001)
- Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat....*,
- Suarsono muhamad, *manajemen strategik konsep dan alat analisis* (yogyakarta: sekolah tinggi ilmu manajemen YKPK)
- Sugiono, *metode penelitian manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Supriyono, *manajemen strategi dan kebijakan bisnis*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1998)
- Jurnal.**
- Jurnal ekonomi syariah indonesia, *analisis akad pembiayaan mudharabah dan implikasinya terhadap kesejah-*

traan anggota dalam perspektif ekonomi syariah.

Jurnal ekonomi syariah indonesia, *analisis akad pembiayaan mudharobahah dan implikasinya terhadap kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi syariah*

Jurnal ekonomi syariah indonesia, *analisis akad pembiayaan mudharobahah dan implikasinya terhadap kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi syariah.*

M. suparmoko, *ekonomi pembangunan*, edisi 5, cetakan BPFE-Yogyakarta.

Internet

<http://kec-pajangan.bantulkab.go.id>

kamis 16 April 2017, pukul 15:12 WIB

<http://www.pnpm> mandiri pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, diakses pada tgl. 11 February 2017. Pukul 09:30 WIB.

<http://www.pnpm> mandiri pedoman umum program nasional

pemberdayaan masyarakat mandiri, diakses pada tgl. 11 February 2017, pukul 09:00 wib

<http://www.pnpm> mandiri pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, diakses pada tgl. 1 desember 2016, Pukul 09:12 WIB.

<http://www.pnpm> mandiri pedoman umum program umum program nasional pemberdayaan masyarakat desa mandiri, diakses pada tgl. 1 desember 2016, Pukul 09:12 WIB

<http://www.pnpm> mandiri pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, diakses pada tgl, 1 desember 2016, pukul 09:10 WIB.

www.kemendagri PNPM Mandiri, Rabo 12 April 2017, pukul 14:00 WIB.

www.ris.uksw.edu di akses selasa 29 April 2017, pukul 11:02 WIB

www.upk pajangan. Profil unit pengelola kegiatan. Rabo 14 April 2017, pukul 14:20 WIB.

Data hasil konsolidasi dan pembersihan databes kependudukan oleh dirjen kependudukan. Kamis 13 April 2017, pukul 13:30 WIB.

Skripsi

Merla Liana Herawati (2014) "*pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerajinan tempurung kelapa: studi di dusun Santan, Guwosari, Pajangan, Bantul*" Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan pengembangan masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Miftahul hikmawati (2016) "*Analisis dampak strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa terhadap kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam melalui program kampung ternak dompet dhuafa yogyakarta*", skripsi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Alma ata Yogyakarta.

Nimayah (2015) "*Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui kerajinan perak oleh*

koperasi produksi pengusaha perak yogyakarta", Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Kali Jaga.

Wulan Mega Ristanti (2014) "*pemberdayaan ekonomi masyarakat di sentra kerajinan tatak sungging wayang kulit di dusun Gendeng, Bangunjiwo Kasihan, Bantul*", Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Paramasari, *strategi dinas koperasi dan ukm kota surakarta dalam pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah*, (yogyakarta: bidang akademik universitas Muhamaddiyah Yogyakarta, 2009)

Wawancara.

Muhamad Irwan Susanto, wawancara langsung tanggal 15 Maret 2017

Muh. Mufasir, wawancara langsung tanggal 15 Maret 2017

Warkis, wawancara langsung tanggal 16 Marat 2017	Nunuk, wawancara langsung 20 Mei 2017
Wakijem, wawancara langsung tanggal 16 Marat 2017	Ani Ariasih, wawancara langsung 24 Mei 2017
Partini, wawancara langsung tanggal 16 Marat 2017	Sutarni, wawancara langsung 25 Mei 2017
Sajinah, wawancara langsung 18 Marat 2017	
Sri Budiah, wawancara langsung 18 Marat 2017	
Wasilah, wawancara langsung 20 Marat 2017	
Sajinah, wawancara langsung 22 Marat 2017	
Sumarti, wawancara langsung 3 April 2017	
Miyem, wawancara langsung 3 April 2017	
Partini, wawancara langsung 3 April 2017	
Suharni, wawancara langsung 6 April 2017	
Ngadiah, wawancara langsung 6 April 2017	
Suminah, wawancara langsung 18 Mei 2017	
Romlah, wawancara langsung 18 Mei 2017	
Sintha Mawarsari, wawancara langsung 18 Mei 2017	
Ngatinem, wawancara langsung 20 Mei 2017	
Supriati, wawancara langsung 20 Mei 2017	